

Sebut Presiden Jokowi Komitmen Tutup Defisit

Yulianna Fauzi , CNN Indonesia

Selasa, 26/09/2017 20:35 WIB



Antisipasi kebocoran anggaran dan penggunaan APBN sebagai jurus menutup defisit telah diproyeksi sejak awal penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan BPJS. (Adhi Wicaksono).

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memastikan defisit anggaran yang setiap tahun terjadi akan tetap ditutupi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kepala Hubungan Masyarakat (Humas) BPJS Kesehatan Nopi Hidayat menegaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berkomitmen untuk menjamin kesehatan masyarakat, termasuk mengantisipasi persoalan pendanaan secara bersama.

"Angka defisit ini diantisipasi bersama, termasuk pilihan dan komitmen Presiden Jokowi untuk mengatasi defisit tersebut melalui anggaran negara," ujar Nopi dalam keterangan resmi yang didapat CNNIndonesia.com, Selasa (26/9).

Antisipasi kebocoran anggaran dan penggunaan APBN sebagai jurus menutup defisit memang telah diproyeksi sejak awal penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) BPJS.

Lihat juga:

[BPJS Ketenagakerjaan Kelola Dana Rp293 Triliun per Agustus](#)

Dengan demikian, pemerintah telah mengetahui konsekuensi atas komitmen penjaminan kesehatan masyarakat sejak anggaran disusun oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

Penggunaan APBN untuk menutupi defisit anggaran BPJS juga dilakukan lantaran

pemerintah tak ingin mengerek besaran iuran peserta karena dinilai akan menambah beban masyarakat.

"Menaikkan iuran tidak menjadi pilihan karena pemerintah tidak ingin membebani rakyat," kata Nopi.

Menurut dia, opsi alternatif berupa pengurangan manfaat layanan untuk peserta yang masuk dalam kelompok dengan penyakit parah tak bisa dilakukan, karena masyarakat membutuhkan jaminan tersebut.

Lihat juga:

[Rawat Inap BPJS Kesehatan Cuma 'Laku' 3 Hari di RS Swasta](#)

Nopi menambahkan, penggunaan APBN untuk menutup celah defisit tersebut setidaknya masih menjadi komitmen pemerintah sampai akhir tahun ini.

Sebelumnya, BPJS Kesehatan memproyeksi, untuk tahun ini saja, defisit bisa mencapai Rp9 triliun. Sementara itu, perhitungan secara kumulatif dari 2014-2016, total defisit anggaran BPJS Kesehatan telah mencapai Rp15,9 triliun, yaitu Rp3,31 triliun pada 2014, Rp9,07 triliun pada 2015, dan Rp8,56 triliun pada 2016 lalu.

Padahal, setiap tahunnya, pemerintah memberikan suntikan anggaran ke BPJS Kesehatan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk menutup defisit tersebut.

Setidaknya, suntikan tersebut telah mencapai Rp9,1 triliun, yaitu sebesar Rp500 miliar pada 2014, Rp5 triliun pada 2015, dan Rp3,6 triliun pada 2016.

Lihat juga:

[Pemerintah Tunggu Audit BPK Tambal Defisit BPJS Kesehatan](#)

(lav)

BPJS Kesehatan Terancam 'Bocor' Rp9 Triliun

Tiara Sutari , CNN Indonesia
Selasa, 26/09/2017 07:27 WIB



Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyatakan terdapat kemungkinan defisit anggaran karena mismatch antara iuran dan biaya manfaat.

(CNN Indonesia/Safir Makki)

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyebut terdapat kemungkinan mengalami selisih ketidaksesuaian (*mismatch*) antara iuran yang didapat dengan biaya manfaat yang harus dikeluarkan sehingga menyebabkan defisit.

Direktur Kepatuhan Hukum dan Hubungan antar Lembaga BPJS Kesehatan, Bayu Wahyudi mengungkapkan, selisih anggaran tersebut terjadi lantaran nilai iuran yang jauh di bawah standar yang ditetapkan.

Bahkan, kata Bayu, selisih tersebut bisa menyebabkan BPJS Kesehatan menelan defisit anggaran hingga Rp 9 triliun.

Lihat juga:

[Pemerintah 'Tombok' Triliunan ke BPJS Kesehatan Tiap Tahun](#)

"Ada ketidakseimbangan antara iuran dan pemakaian. Perhitungan kami ini bisa defisit sampai Rp9 triliun," kata Bayu di Gedung Kementerian Perdagangan, Senin (25/9).

Defisit ini sendiri, diakui Bayu diketahui dari hasil perhitungan aktuaria mengenai tarif iuran yang ideal.

Lihat juga:

[BPJS Kesehatan Minta Iuran Naik Demi Tutup 'Bocor' Rp9 T](#)

Dari perhitungan saat ini, lembaga pelayanan kesehatan masyarakat itu justru diketahui harus menanggung mismatch karena tarif iuran yang tidak mencapai keekonomian, khususnya untuk peserta golongan Penerima Bantuan Iuran (PBI).

"Perkiraan dari perhitungan, prediksi defisit mencapai Rp9 triliun. Ini kami tahu dari hasil hitung aktuarial dan akademisi, jelas bahwa dari awalnya sudah diperhitungkan akan terjadi ketidakseimbangan," kata Bayu.

Lihat juga:

[BPJS Kesehatan Menolak Disebut Tak Ramah Anak](#)

Oleh karena itu, Bayu pun berharap agar pemerintah bisa segera membantu menutupi polemik defisit anggaran yang secara terus menerus dialami oleh lembaga bantuan kesehatan ini.

"Kami minta bantuan pemerintah saja agar bisa menutup kemungkinan defisit ini," kata Bayu. **(gir/asa)**